



Impelentasi pencatatan laporan keuangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara

Marce Sherly Kase¹, Paulina Rosna Dewi Redjo²

^{1,2}Universitas Timor

¹kase.sherly@unimor.ac.id, ²dewiredjo@unimor.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15 November 2022

Disetujui 20 Desember 2022

Diterbitkan 26 Januari 2023

Kata kunci:

Pencatatan keuangan; Usaha kecil dan menengah; Praktik akuntansi; Manajemen keuangan; Informasi keuangan

Keywords:

Financial records; Small and medium enterprises; Accounting practice; Financial management; Financial information

ABSTRAK

Masalah manajemen keuangan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh usaha kecil dan menengah, praktik akuntansi adalah solusi yang dapat diterapkan sehingga memudahkan penerapan pencatatan akuntansi yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi yang dilakukan oleh usaha kecil menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan sektor unggulan. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan paradigma interpretif. Data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam terhadap 28 informan untuk melihat praktek penerapan pencatatan keuangan telah disajikan dengan baik dan benar kemudian mengacu pada teori sistem akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan keuangan yang telah berlaku secara umum. Terdapat dua bentuk praktik akuntansi pada usaha kecil dan menengah yaitu akuntansi yang hanya dipraktikkan dalam ingatan dan dibuatnya beberapa catatan akuntansi hingga tersusunnya laporan keuangan neraca dan L/R. Manfaat dua bentuk akuntansi ini hanya sebatas sebagai pengendalian beberapa kegiatan usaha. Hasil pengamatan dilapangan berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 85% pelaku UKM di Kabupaten TTU dalam bidang usaha perdagangan dan otomotif masih belum memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi keuangan secara lengkap dan tepat.

ABSTRACT

Financial management problems are problems that are often faced by small and medium businesses. Accounting practices are solutions that can be applied to make it easier to apply the accounting records used. This study aims to determine the application of accounting carried out by small and medium enterprises in North Central Timor Regency, which is a leading sector. The analysis technique uses descriptive qualitative analysis, using an interpretive paradigm. Data was collected through in-depth interviews with 28 informants to ensure that the practice of implementing financial records had been presented properly and correctly, and then referred to the theory of accounting systems related to generally accepted financial records. There are two forms of accounting practices in small and medium enterprises, namely, accounting, which is only practiced in memory, and making several accounting records to compile balance sheets and L/R financial statements. The benefits of these two forms of accounting are limited to controlling several business activities. The results of field observations based on interviews show that as many as 85% of SMEs in TTU Regency in the trade and automotive business sectors still do not have the ability to present complete and accurate financial information.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil yang ada di Indonesia merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peran penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Selain itu Usaha Mikro kecil juga berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran melalui penerapan tenaga kerja (Akbar, 2019). Data menunjukkan bahwa jumlah unit usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 99,9 % (64,1 Juta), dengan jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2020 total 120,6 Juta orang, selain itu jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 Juta (97%) , kemudian berkontribusi pada PDB, Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598. Miliar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07 % atau 8.573.895 Miliar, kemudian menyumbang pada Ekspor Non-migas di tahun 2018 sebesar 2.044.490 Miliar, UMKM berkontribusi terhadap ekspor non-migas sebesar 14,37 % atau 293.840 Miliar, dan terakhir berkontribusi terhadap Investasi, yang mana jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685

Miliar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 60,42% atau 2.564.549 Miliar (Kase et al., 2022).

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada tahun 2020 bahwa tercatat 3.102 buah usaha mikro, 19 buah usaha kecil dan 9 buah usaha menengah yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 3.091 buah usaha mikro, 19 buah usaha kecil dan 9 buah usaha menengah (Kase et al., 2022). Dengan adanya peningkatan usaha mikro kecil menengah maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten TTU (Redjo, 2022). Dapat dicermati bahwa usaha kecil menengah memiliki keunggulan antara lain: (1) mudah dalam menciptakan lapangan kerja dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya (2) Memiliki kemampuan penyesuaian diri terhadap kondisi pasar yang terus menerus mengalami perubahan (3) memiliki peluang yang besar sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada perdagangan dan ekspor. (Susanti & Kabibah, 2021). Berkaitan dengan hal diatas maka, informasi akuntansi menjadi penting dalam meraih keberhasilan usaha bagi Usaha Kecil dan menengah melalui kemampuan untuk menyajikan laporan keuangan secara terperinci sesuai dengan prinsip akuntansi yang memudahkan pengusaha dalam melakukan tinjauan demi keberlangsungan usahanya (Maherni, dkk. 2021). Setiap perusahaan wajib memiliki laporan keuangan yang menganalisis kinerja keuangan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang berguna bagi mereka untuk membuat keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Putra, 2012).

Laporan keuangan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam rangka membuat keputusan financial serta mempertanggungjawabkan manajemen atas penggunaan sumber daya dalam usaha tersebut (Dewi & Sari, 2019). Informasi akuntansi berupa pencatatan keuangan dapat menjadi modal awal bagi usaha mikro kecil dan menengah dalam dalam mengambil keputusan pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah yang berkaitan dengan pengembangan pasar, penentuan harga dan lainnya.(Andasari, dkk, 2019). Penyediaan informasi akuntansi berhubungan juga dengan pemerintah dan pihak ketiga yang memberikan dana dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Proses pencatatan keuangan merupakan alur dalam proses akuntansi. Bisnis yang memiliki keinginan untuk bertahan lama, maka para pelaku usaha dituntut untuk melakukan pencatatan keuangan yang merupakan tahap penting yang tidak boleh diabaikan dalam kegiatan bisnis sehingga para pelaku usaha dapat mengetahui secara jelas pembukuan untuk setiap transaksi yang terjadi selama satu periode.

Namun pada kenyataannya masih rendahnya kesadaran dari para pelaku usaha mikro kecil untuk melakukan pencatatan (Armando, 2014). Pada hakikatnya usaha kecil dan menengah di dorong untuk melakukan pencatatan dan penataan laporan keuangan yang merupakan aspek penting dalam menjalankan kegiatan usaha (Sulistiyowati, 2017). Informasi akuntansi yang berupa pencatatan keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi usaha kecil dan menengah yang merupakan modal awal dalam mengambil keputusan pada pengelolaan usahanya (Andarsari & Dura, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Khabibah, 2021) menyatakan bahwa penelitian terdapat salah satu praktik akuntansi yang menunjukkan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh UKM Kopi hanya sebatas laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing Pengelola UKM Kopi, belum adanya penyusunan laporan keuangan di sesuai dengan standar akuntansi.

Upaya mengatasi minimnya kesadaran pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan pencatatan maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada tanggal 18 Mei 2016, SAK EMKM mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2018, standar yang dimaksud meliputi: (1) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. (2) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Standar yang telah dibuat oleh IAI diharapkan mampu mempermudah usaha kecil menengah dalam melakukan pencatatan sesuai dengan standar yang sederhana, namun masih ada usaha kecil menengah yang memiliki berbagai alasan untuk tidak melakukan pencatatan (Armando, 2014). Sehingga berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi yang dilakukan oleh usaha kecil menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif merupakan data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam terhadap para informan untuk melihat praktek penerapan pencatatan keuangan para pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten TTU. Informan yang terdiri dari usaha kecil sebanyak 19 unit usaha dan 9 unit usaha menengah pada jenis usaha perdagangan dan otomotif. Penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur guna menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan mendalam. Menurut (Sugiyono, 2015) mengemukakan wawancara semistruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan instrumen namun pertanyaan lebih terbuka dan dapat berkembang tanpa harus terpaku pada instrumen yang telah ditetapkan guna mendapatkan jawaban yang lebih dalam, detail, dan mengeksplorasi seluruh persepsi dan kondisi informan. Peneliti bertanya sesuai dengan instrumen pertanyaan yang telah disiapkan kemudian instrumen tersebut dikembangkan guna mengeksplorasi jawaban informan lebih dalam dan mendetail sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapan penelitian yaitu dimulai dari identifikasi masalah penelitian diawali dengan observasi fenomena yang terjadi kemudian diringkas menjadi masalah penelitian, review literatur berupa kajian teori yang berhubungan dengan masalah penelitian., tujuan spesifik dari penelitian ini diperoleh setelah masalah penelitian dan review literatur dilakukan. Tujuan spesifik penelitian ini dapat menentukan arah yang jelas dalam penelitian seperti sumber data penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara yang mendalam kepada para informan. Analisa dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Tahapan akhir dengan memaparkan hasil penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan sebagai jawaban atas masalah penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria UMKM

Pada prinsipnya usaha mikro (UMi), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) dibedakan berdasarkan nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset tahunan rata-rata atau jumlah karyawan. Namun, definisi UMKM berdasarkan kategori tersebut berbeda di setiap negara. Di Indonesia, kriteria UMKM diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pembatasan yang diberlakukan oleh undang-undang adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria UMKM

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 juta - 500 Juta	> 300 juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : (Republik Indonesia, 2008)

Standar Berbasis Pengembangan untuk UKM Hukum Ditinjau dari perkembangan UMKM dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

- Mata Pencaharian Kegiatan usaha kecil dan menengah yang mencari nafkah sebagai lapangan pekerjaan sering disebut sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- Usaha mikro adalah usaha kecil dan menengah yang bersifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat wirausaha.
- Usaha Kecil Dinamis, adalah usaha kecil dan menengah yang telah berwirausaha dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor (Sudaryanto, 2014).
- Fast Moving Enterprise, yaitu usaha kecil dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi usaha besar (UB).

Defenisi UMKM Oleh Lembaga Dunia Dan Negara-Negara Asing

Di dunia atau di negara lain, sesuai dengan karakteristik masing-masing negara, terdapat berbagai definisi yang cocok untuk usaha kecil dan menengah. Definisi tersebut, yaitu definisi dan standar asing untuk usaha kecil dan menengah didasarkan pada berikut aspek-aspeknya yaitu jumlah

tenaga kerja, pendapatan, dan jumlah aset (Khudaeefah, 2018). Paparan berikut adalah kriteria-kriteria UMKM di negara-negara atau lembaga asing

1. World Bank, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu :
 - a. Medium Enterprise, dengan kriteria :
 - 1) Jumlah karyawan maksimal 300 orang
 - 2) Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta
 - 3) Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta
 - b. Small Enterprise, dengan kriteria :
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta
 - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta
 - c. Micro Enterprise, dengan kriteria :
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu
 - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$ 100 ribu
2. Singapura mendefinisikan UMKM sebagai perusahaan dengan setidaknya 30% ekuitas lokal dan aset produktif tetap di bawah S\$15 juta (setara dengan US\$8,7 juta). Untuk perusahaan jasa, jumlah karyawan minimal adalah 200 orang.
3. Malaysia menetapkan bahwa usaha kecil, menengah dan mikro didefinisikan sebagai perusahaan dengan kurang dari 75 karyawan tetap atau modal pemegang saham kurang dari RM2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5–50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu
 - b. Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50–75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu – M \$ 2,5 juta.
4. Jepang, membagi UMKM sebagai berikut :
 - a. Mining and manufacturing, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US\$ 2,5 juta.
 - b. Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 840 ribu
 - c. Retail, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 820 ribu
 - d. Service, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 420 ribu
5. Korea Selatan, mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang jumlahnya dibawah 300 orang dan jumlah asetnya kurang dari US\$ 60 juta.
6. European Commission, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu:
 - a. Medium-sized Enterprise, dengan kriteria :
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 250 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 50 juta
 - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$ 50 juta
 - b. Small-sized Enterprise, dengan kriteria :
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 50 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 10 juta
 - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$ 13 juta
 - c. Micro-sized Enterprise, dengan kriteria :
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 2 juta
 - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$ 2 juta

Ciri dan Karakteristik UMKM

1. Ciri Ciri UMKM
 - a. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
 - b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
 - c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak

- memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- d. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
 - e. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
 - f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
2. Karakteristik UMKM
- a. Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk handmade sehingga standar kualitasnya beragam
 - b. Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru
 - c. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama
 - d. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan
 - e. Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda
 - f. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.

Kemiskinan Sebagai Alasan Perlunya Memberdayakan UMKM

Kemiskinan secara sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi kekurangan yang terjadi pada diri seseorang. Kekurangan ini disebabkan ketidakmampuan mereka untuk mencapai taraf hidup yang layak. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berjuang untuk memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal pangan, kesehatan dan pendidikan. Indonesia telah mengembangkan berbagai program anti kemiskinan untuk mengurangi kemiskinan. Misalnya, pemerintah Indonesia memiliki program dan kebijakan untuk memberdayakan masyarakat melalui fasilitas kredit komersial. Departemen pajak juga berpihak pada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Pemerintah sudah membedakan besaran pajak yang harus dibayar orang kaya, misalnya melalui pajak kendaraan progresif. Tingkat kemiskinan yang tinggi atau rendah berimplikasi pada masyarakat dan negara. Dalam jangka panjang, akibat dari kemiskinan akan menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat, yang akan memicu putusannya hubungan sosial dalam masyarakat (Gunawan & Wahyuni, 2014).

Kemiskinan menyebabkan penurunan daya saing sumber daya nasional dalam skala yang lebih besar. Artinya, kemiskinan harus diberantas secara progresif melalui program dan kebijakan terkait. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang kompleks. Pendekatan kemiskinan yang terfragmentasi tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas. Kemiskinan menghilang dengan sendirinya ketika pendapatan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi meningkat. Pendapatan ini menentukan standar hidup dan kualitas hidup seseorang. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan upaya gabungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pekerjaan stabilitas dan populis.

Indonesia merupakan negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam. Namun, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lain dalam hal sumber daya manusia. Situasi ini menyedihkan. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah tidak dapat dikelola dengan baik karena kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Indonesia. Akibatnya, muncul fenomena sosial yang tiada henti di masyarakat, yaitu masalah kemiskinan. Berawal dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat memaksimalkan pelaksanaan hak pembangunan daerah. Padahal pemerintah daerah telah melakukan upaya besar dalam pengentasan kemiskinan di daerahnya.

Namun dalam praktiknya, upaya ini dianggap kurang optimal. Secara kuantitatif, angka kemiskinan tidak menurun secara signifikan. Sangat mudah untuk menemukan orang yang masih hidup di bawah standar yang layak. Pengelolaan usaha kecil, menengah dan mikro di daerah masih

belum sempurna. Hal ini terlihat dari sangat sedikitnya produk unggulan usaha kecil, menengah, dan mikro yang mampu bersaing di pasar lokal, terutama pasar internasional. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah UMKM di setiap daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM di daerah belum maksimal. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan mikro daerah harus dilakukan secara menyeluruh dalam upaya pengentasan kemiskinan daerah. Orang miskin umumnya kurang berpendidikan sehingga kurang mampu bersaing di tempat kerja. UMKM merupakan unit usaha yang mempekerjakan tenaga kerja sektor informal. Kondisi ini seharusnya dilihat sebagai tanda perlunya pemberdayaan UMKM sebagai sarana pengentasan kemiskinan.

Koperasi adalah lembaga tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki kepentingan yang relatif sama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Konsep ini melihat koperasi sebagai entitas komersial yang penting secara strategis bagi para anggotanya untuk mencapai tujuan ekonomi yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan UMKM juga bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekspor, dll, dengan meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum, mengembangkan sistem insentif untuk mengembangkan wirausaha baru berbasis teknologi atau berorientasi ekspor, serta meningkatkan dan memperluas pasar ekspor produk UMKM. Dengan latar belakang tersebut, terdapat kebutuhan untuk memfasilitasi UMKM dalam hal formalisasi usaha dan perizinan dengan mengembangkan model layanan satu atap untuk mempercepat proses dan mengurangi biaya perizinan. Selanjutnya, dikembangkan budaya bisnis dan kewirausahaan, khususnya di kalangan tenaga kerja muda, melalui pelatihan, konsultasi dan pendampingan pendampingan, serta kemitraan bisnis. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Penciptaan iklim usaha yang lebih sehat untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin kepastian usaha, dan mendorong terbentuknya efisiensi ekonomi;
2. Pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi pendukung usaha UMKM agar mampu meningkatkan akses kepada sumber daya produktif dalam rangka pemanfaatan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia;
3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penumbuhan jiwa dan sikap kewirausahaan, termasuk pemanfaatan iptek dan pemanfaatan peluang yang terbuka di sektor agribisnis dan agroindustri; dan
4. Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, ditingkatkan pula kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam usahaskala mikro pada sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro yaitu pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional. Penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro. Penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro; serta Peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil.

Berbagai Masalah Dalam UMKM

Masalah utama UKM Indonesia adalah kendala internal. Kendala internal meliputi masalah permodalan, sumber daya manusia, hukum dan akuntabilitas, menurut Bank Indonesia. Dari sini kendala internal yang sering dihadapi UKM adalah keterbatasan dana dan keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan pendanaan menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Tanpa dana yang cukup, produk yang bisa dihasilkan sangat terbatas. Karena volume produksi yang terbatas, cakupan pasar yang dapat dicapai juga terbatas. Pada akhirnya, potensi UMKM tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kendala sumber daya manusia mempengaruhi banyak hal dalam pelaksanaan bisnis, antara lain kualitas, daya saing, dan jangkauan produk yang dimiliki. Salah satu contoh buruknya kualitas sumber daya manusia dalam proses produksi adalah kurangnya manajemen pengendalian. Manajemen kontrol yang rendah dapat mengakibatkan hasil produksi yang tidak konsisten sehingga menghasilkan produk yang

berkualitas rendah. Kreativitas SDM yang rendah dalam proses pengemasan akan mengakibatkan kemasan yang tidak menarik dan tahan lama, membuat produk UMKM kalah bersaing dengan pemain besar yang ada. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi juga akan menyebabkan terbatasnya jangkauan pasar di wilayah sekitar operasional perusahaan. Pada dasarnya, sumber daya manusia yang terbatas bisa menjadi penyebab mengapa sebuah bisnis tidak bisa maju atau bahkan gagal. Selain kendala internal, perusahaan UMKM juga mengalami kendala eksternal. Menurut Bank Indonesia (2015), kendala eksternal yang dihadapi UMKM antara lain lingkungan usaha, infrastruktur dan akses. Kendala internal dan eksternal yang dihadapi UMKM harus dibantu oleh pemerintah agar UMKM yang ada dapat lebih berkembang dan bersaing.

Solusi permasalahan UMKM yaitu bantuan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala finansial dan sumber daya manusia. Dengan menyediakan tenaga pembantu yang mumpuni dan berpengalaman di bidangnya masing-masing, para pelaku UMKM bisa mendapatkan arah yang tepat baik untuk memperoleh tambahan modal, mengelola usahanya, maupun meningkatkan keterampilan sumber daya manusia untuk menciptakan produk yang berdaya saing. Saat ini, sebagian besar layanan yang diberikan hanya berupa pelatihan. Kegiatan pelatihan seperti itu memang diperlukan, namun kegiatan pembinaan juga tidak kalah pentingnya. Karena dengan pendampingan tersebut, pemerintah dapat menindaklanjuti kegiatan pelatihan yang ada. Pelatihan tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga diterapkan di masyarakat. Kegiatan pendampingan saat ini perlu perbaikan serius untuk mencapai tujuan pendampingan yang sebenarnya. Peserta UMKM juga membutuhkan mitra yang merupakan individu yang berpengalaman di bidang usaha yang sama. Tujuannya adalah menumbuhkan UKM yang tangguh dan mandiri.

Penerapan Pencatatan Keuangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten TTU

UKM memiliki potensi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. UKM memiliki peran yang besar yang dibuktikan melalui kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan berbagai layanan ekonomi untuk menyeimbangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjaga stabilitas nasional (Djadjuli, 2018). UMKM merupakan sektor usaha produktif mandiri yang terdiri dari individu dan badan usaha dari semua sektor ekonomi. Terkait masalah pendanaan, pemerintah berupaya memberikan dukungan pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun skema ini juga belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pertumbuhan kredit UMKM dalam Rencana Bisnis Perbankan (RBB) 2012 diperkirakan meningkat 18% atau Rp151 triliun dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp128,2 triliun. ,8% dari RBB tahun 2011. Akses kredit oleh UKM terbatas karena tidak ada informasi yang tersedia yang dapat digunakan oleh manajemen, calon investor atau kreditur untuk menilai perkembangan UKM tersebut.

Kreditur atau bank tidak membedakan antara perusahaan besar dan UKM, yang perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur, termasuk harus memberikan laporan keuangan, yang menjadi dasar bagi kreditur untuk memberikan pinjaman kepada calon debitur. Selain itu, sebagian besar UKM tidak menerapkan dan menggunakan informasi akuntansi secara optimal dalam mengelola usahanya. Di sinilah praktik akuntansi mulai penting bagi UKM. Dengan praktik akuntansi yang tepat, UKM dapat memberikan informasi bisnis dan status keuangan yang lebih rinci dan terstruktur. Salah satu kelemahan usaha kecil adalah belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang baik atau belum memiliki sistem akuntansi. UKM ini seringkali tidak memiliki atau tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola pencatatan keuangan secara disiplin melalui pembukuan secara berkala. Sedemikian rupa sehingga banyak dari mereka yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Pembukuan dan pelaporan keuangan menjadi fokus bagi para pengusaha UMKM untuk dapat mengatasi masalah perkreditan dan mengelola keuangannya. Hal ini mungkin disebabkan karena sebagian besar responden tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi sehingga menganggap pembukuan tidak dilakukan secara rutin.

Pada hakikatnya sistem pencatatan keuangan usaha kecil menengah di Kabupaten TTU dilakukan masih sangat sederhana hanya berupa kas masuk dan kas keluar, pada transaksi yang bersifat penerimaan kas yang terjadi diakui sebagai pendapatan dan pada transaksi pengeluaran kas diakui

sebagai pengeluaran. Pencatatan keuangan tidak berakhir pada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai alat komunikasi antara data transaksi keuangan dengan aktifitas usaha dengan proses akuntansi yang menghasilkan nilai usaha guna memberikan pandangan pada pengambilan keputusan (Armando, 2014). Tujuan pembuatan laporan keuangan yakni menyajikan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. Tidak tersedianya laporan keuangan maka para pelaku usaha akan kesulitan dalam memperoleh tambahan modal dari para kreditur. Oleh sebab itu, pembukuan dan pelaporan keuangan merupakan hal yang cukup penting dalam pertumbuhan dan perkembangan usaha (Rudiantoro & Siregar, 2014).

Tabel 2. Hasil Wawancara UKM Penerapan Pencatatan Keuangan UKM di Kabupaten TTU

Informan	Jenis Usaha	Kesimpulan
NU, YS, YL, MS	Perdagangan	Tidak membuat laporan keuangan, karena catatan untuk setiap transaksi tidak lengkap. Pencatatan dilakukan pada saat diingat saja.
EIL, YVL, RN, ML	Perdagangan	Tidak membuat laporan keuangan, karena catatan untuk setiap transaksi tidak lengkap. Pencatatan dilakukan pada saat diingat saja.
AF, DW, YM, IM	Perdagangan	Tidak membuat laporan keuangan, karena catatan untuk setiap transaksi tidak lengkap. Pencatatan dilakukan pada saat diingat saja.
LE, AM, ANM, TM	Perdagangan	Tidak membuat laporan keuangan, karena catatan untuk setiap transaksi tidak lengkap. Pencatatan dilakukan pada saat diingat saja.
SS, SL, TL, NM	Otomotif	Tidak membuat laporan keuangan, karena catatan untuk setiap transaksi tidak lengkap. Pencatatan dilakukan pada saat diingat saja.
LT, MT, NT, RN	Otomotif	Tidak membuat laporan keuangan, karena catatan untuk setiap transaksi tidak lengkap. Pencatatan dilakukan pada saat diingat saja.
JWR, LT, YB, SB	Otomotif	Tidak membuat laporan keuangan, karena catatan untuk setiap transaksi tidak lengkap. Pencatatan dilakukan pada saat diingat saja.

Sumber: Olahan Penulis, 2022

Berdasarkan data pada tabel 2 hasil wawancara yang dilakukan kepada 28 orang informan pada kategori usaha perdagangan dan otomotif di Kabupaten TTU, menunjukkan bahwa dalam transaksi yang terjadi tidak pernah dilakukan pencatatan secara lengkap dan pencatatan akan dilakukan ketika diingat oleh para informan sehingga pencatatan untuk tiap transaksi menjadi tidak lengkap. Gambaran struktural pelaporan keuangan masih ala kadarnya. Pernyataan ini sejalan dengan temuan (Armando, 2014) yang menunjukkan bahwa UKM memiliki intensitas pencatatan keuangan yang rendah, seringkali gagal mencatat transaksi dengan benar, dan hanya sedikit pelaku usaha yang menyelesaikan pencatatan sebelum laporan keuangannya dibuat. Badan atau isi utama laporan neraca UKM sendiri hanya terdiri dari aset dan modal, dan bagian pasiva tidak muncul di neraca. Ini berbeda dengan neraca normal, yang seharusnya terdiri dari aset, kewajiban, dan modal. Sedangkan isi laporan UKM L/R sendiri meliputi pendapatan, biaya dan laba rugi. "Kesederhanaan" praktik akuntansi ini menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan sangat sederhana dan tampak tidak lengkap. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi pemilik masih sangat terbatas sehingga praktik akuntansi masih jauh dari standar SAK ETAP.

KESIMPULAN

Praktek akuntansi yang diterapkan oleh para pemilik usaha kecil menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara yang diungkapkan dalam penelitian ini yaitu praktik akuntansi yang sederhana mencakup pencatatan kas masuk dan keluar saja, serta hanya ada dalam ingatan saja, para pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara belum siap untuk melakukan pencatatan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman para pelaku usaha akan standar akuntansi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2019). Analisis Penerapan Pencatatan Akuntansi Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah Pada Usaha Kecil dan Menengah Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. *Sripsi. Universitas Muhammadiyah Makasar*.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7977-Full_Text.pdf
- Andarsari, P. R., & Dura, J. (2018). Implementasi pencatatan keuangan pada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(1), 59–65.
- Armando, Z. (2014). *Eksplorasi dan Remodelling Akuntansi Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*. Universitas Brawijaya.
- Dewi, L. G. K., & Sari, L. G. J. M. (2019). Analisis Kesiapan dan Pengetahuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM (Studi Kasus pada Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 141–160.
- Djadjudi, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Gunawan, A., & Wahyuni, S. F. (2014). Pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perdagangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 13(1).
- Kase, M. S., Babulu, N. L., & Redjo, P. R. D. (2022). Perbedaan Omzet Penjualan UMKM Sebelum dan Selama Pandemi Covid -19 di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Sebatik*, 26(1), 300–305.
- Khudaefah, I. im. (2018). *Analisis Yuridis Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Ukm (Usaha Mikro Kecildan Menengah) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Putra, H. A. (2012). *Penyusunan Laporan Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)(Studi Kasus Ud Multi Mulia Megah, Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga)*. Program Studi Akuntansi FEB-UKSW.
- Redjo, P. R. D. (2022). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap UMKM di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Monex: Journal of Accounting Research*, 11(01), 61–65.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2014). Kualitas laporan keuangan umkm serta prospek implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1–21.
- Sudaryanto, R. W. (2014). Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. *Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Penerbit Alfabeta. Yogyakarta.
- Sulistyowati, Y. (2017). Pencatatan Pelaporan Keuangan Umkm (Study Kasus Di Kota Malang). *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 49–55.
- Susanti, R. N., & Khabibah, N. A. (2021). Implementasi Pencatatan Laporan Keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada Sentra UKM Kopitas Di Kabupaten Temanggung). *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04), 524–531.